

BAB VI

HASIL PENELITIAN

6.1 Kerangka Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan secara kualitatif. Uraian ini meliputi variabel faktor personal kemitraan, jenjang atau tingkat kemitraan, dan faktor pengelolaan kemitraan, serta perkembangan kemitraan dan keberhasilan kemitraan.

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam yang dilakukan terhadap orang-orang dari lintas sektor yang terdiri dari Komnas FBPI, Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Departemen Kesehatan (Depkes), Unicef, PP Muhammadiyah, dan CBAIC mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka konsep. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan, notulensi rapat, dan dokumen tertulis lainnya.

6.2 Deskripsi Informan

Informan wawancara mendalam dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari lintas sektor dan organisasi. Deskripsi informan-informan tersebut dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.1 Karakteristik Informan

Instansi	Umur	Jenis Kelamin	Lama Bekerja	Pendidikan	Jabatan	Kode
Komnas FBPI	27 tahun	Laki-laki	2 tahun	S1 Ekonomi	Staf Komunikasi	P1
Departemen Kesehatan	33 tahun	Laki-laki	14 tahun	S2 Public Health	Fungsional Penyakit Kesehatan Masyarakat	P2
Departemen Komunikasi dan Informasi	57 tahun	Laki-laki	3 tahun	S2 Komunikasi	Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	P3
CBAIC	42 tahun	Perempuan	2 tahun	S1 Antropologi	Senior Technical Advisor for Advocacy	P4
Unicef	29 tahun	Laki-laki	1,5 tahun	S1 Sejarah	Media Specialist Avian Influenza Communication Team	P5
PP Muhammadiyah	28 tahun	Perempuan	6 tahun	S2 International Development Studies	Manajer Program TPFB (Tim Penanggulangan Flu Burung)	P6

Dari segi usia, informan yang termuda berusia 27 tahun dan yang tertua berusia 57 tahun. Sebagian besar informan bekerja pada instansi yang sekarang selama 1,5 tahun lebih.

Tabel 6.2 Karakteristik Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	4	66,7%
Perempuan	2	33,3%
Jumlah	6	100%

Informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang atau sebesar 66,7%. Sedangkan informan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang atau sebesar 33,3%.

Tabel 6.3 Karakteristik Informan berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
S1	3	50%
S2	3	50%
Jumlah	6	100%

Tiga informan telah menyelesaikan pendidikan S2 (50%) sedangkan tiga informan lainnya berpendidikan S1 (50%).

6.3 Hasil Penelitian

6.3.1 Faktor Pelaku Kemitraan

6.3.1.1 Pengetahuan Mengenai Flu Burung

Pengetahuan merupakan bukti bahwa seseorang telah melakukan proses pengingatan atau pengenalan terhadap suatu informasi (Bloom dalam Notoatmodjo, 2003). Menurut Wursanto (2002), wawasan dan pengetahuan seseorang akan mempengaruhi kompetensinya. Pengetahuan dan wawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang flu burung secara umum. Flu burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, yaitu H5N1 dan ditularkan oleh unggas.

Dari hasil wawancara terhadap informan di instansi-instansi yang menjadi mitra bidang komunikasi Komnas FBPI, diperoleh informasi bahwa seluruh informan sudah mengetahui tentang penyakit flu burung. Berikut penuturan dari beberapa informan:

"Flu burung kan sebetulnya sejenis virus yang mempunyai mutasi H5N1 yang menyerang siapa saja..dulu kan virus yang menular dari unggas ke unggas, tapi H5N1 itu ternyata bisa menular dari unggas ke manusia." (P3)

"Penyakit yang disebabkan virus avian influenza tipe A, H5N1...penularannya dari unggas ke manusia.." (P2)

"Sebenarnya kalau flu burung itu kan dari virus ya, namanya dari virus H5N1." (P6)

"Flu burung itu sebenarnya penyakit di hewan, penyakit di avian.. avian itu burung-burung yang kebanyakan hidup di seputar air, termasuk ayam, bebek, jenis-jenis seperti itu." (P4)

Salah satu bentuk pesan yang diinformasikan kepada masyarakat melalui program mereka adalah mengenai pencegahan penyakit flu burung. Walaupun sebagai penyelenggara, sebaiknya mereka juga mengetahui tentang cara-cara pencegahan penyakit flu burung. Cara-cara pencegahannya antara lain tidak menyentuh unggas yang sakit atau mati, mencuci tangan menggunakan sabun, dan memisahkan unggas dari manusia. Berdasarkan wawancara, seluruh informan sepakat bahwa pada intinya cara pencegahannya adalah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Berikut hasil wawancara dengan informan:

"Kalau pencegahannya, sebenarnya yang paling simple itu perilaku hidup bersih. Jadi kan kalau di kita kan ada PHBS ya kalau gak salah." (P6)

"..intinya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat..kalo kita melakukan PHBS, tidak hanya flu burung penyakit2 lain demam berdarah, TBC akan hilang dengan sendirinya." (P2)

Pengetahuan dapat diperoleh dari melihat atau mendengar, selain itu juga dari pengalaman dan proses belajar (Notoatmodjo, 2003). Para informan mengaku bahwa mereka mengetahui hal-hal mengenai flu burung karena mereka bekerja di tempat yang memang khusus menangani flu burung, selain itu juga mereka mendapat informasi dari internet dan media lainnya. Ada pula yang mendapat informasi dari seminar-seminar atau pertemuan keilmuan tentang flu burung. Berikut petikan wawancaranya:

"Saya flu burung tau dari media elektronik, cetak, dari internet, karena saya konsen di flu burung ya semua dari para ahli pakar-pakar, dokter, juga mengenai kliniknya, dari masyarakat juga ada, hampir semua.." (P2)

"Karena saya kerja disini, Saya dapat dari jurnal ilmiah, dapat dari laporan-laporan dari negara lain, kalo seminar atau lokakarya biasa saya yang bikin. Ini kan proyek internasional. seminar atau lokakarya biasa saya yang bikin." (P4)

6.3.1.2 Pemahaman Konsep Kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 informan diperoleh informasi bahwa sebagian besar informan memahami kemitraan sebagai hubungan yang sejajar atau *equal*. Maksud hubungan yang sejajar disini yaitu organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati Berikut petikan wawancaranya:

"Kemitraan itu Sebenarnya hubungan kerja sama yang equal, yang setara antar dua pihak, itu yang saya tangkap. Jadi equal dalam hak dan kewajibannya." (P4)

"Sebenarnya kemitraan itu ya fungsi kesejajaran. Jadi kesejajaran dalam artian, kita berada dalam satu level saling membutuhkan. Karena sudah jelas peran mainnya apa dgn apa gitu. Jadi lebih kearah sana." (P6)

Namun, ada pula yang menyebutkan dengan lengkap pengertian kemitraan bahwa tidak hanya fungsi kesejajaran, tapi juga ada keterbukaan dan keuntungan yang didapat. Keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota, serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan yang didapat yaitu organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh keuntungan atau manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Berikut petikan wawancaranya:

"Tiga prinsip kemitraan equity, kesamaan, jadi dalam satu kemitraan itu membangun itu dalam tahap yang sama, semua dari pihak yang ikut serta pada posisi yang sama, tidak ada yang dibawah tidak ada yang di atas...kesetaraan, saling menguntungkan jadi dalam kemitraan itu ada hal-hal yg positif dari keduanya.." (P2),

Tujuan dari kemitraan adalah meningkatkan percepatan, efektifitas, dan efisiensi dalam upaya penanganan, dalam hal ini flu burung. (Depkes, 2002). Adapun tujuan setiap institusi dalam kemitraan penanggulangan flu burung pada intinya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi flu burung. Hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu:

"Tujuannya sebenarnya sederhana yaitu...ingin menyelaraskan inisiatif-inisiatif kegiatan komunikasi yang ada di masyarakat untuk mencapai cakupan seluas-luasnya masyarakat yang terpapar informasi mengenai flu burung gitu..sekarang memang belum tahap ke situ...sekarang masih bermitra untuk menciptakan pemahaman kesadaran dari setiap stakeholder, setiap organisasi, setiap instansi untuk membuat kegiatan komunikasi, membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai flu burung. Kalo misalnya ini tercapai sudah ada kesadaran dari setiap instansi, dari setiap organisasi untuk membuat suatu kegiatan flu burung, baru tahap selanjutnya menyelaraskan untuk mencapai tujuan yaitu mencakup sebesar-besarnya masyarakat yang akan dievaluasi."(P1)

”Satu menurunkan risiko orang tertular oleh virus, kedua menekan penyebaran virus tersebut karena walaupun tidak tertular tetap ada kerugian peternak dan pemelihara unggas. ketiga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap cara-cara perlindungan diri dan pencegahan, keempat untuk mencegah meminimalisir kemungkinan pandemi flu, yang kemungkinan berasal dari flu burung.” (P5)

”Tujuan Depkes adalah memasyarakatkan masyarakat, menciptakan masyarakat untuk hidup sehat, dan supaya orang yang sehat tetap sehat dan yang sakit enggak sehat..ujungnya kan kesitu..hanya cara ke arah situ..” (P2)

6.3.1.3 Keahlian dan Kesepakatan Peran

Kemitraan adalah memadukan keterampilan, keahlian, dan sumber daya lainnya. Dengan adanya pemetaan keterampilan, keahlian, dan sumber daya maka akan lebih memudahkan dalam pembagian tugas dan peran setiap mitra yang pada akhirnya tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan oleh para mitra. Keahlian yang dimiliki tiap instansi yang terlibat dalam kemitraan kelompok kerja komunikasi ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri.

Setiap informan ketika di wawancarai dapat menjelaskan keahlian instansi mereka masing-masing. Seperti yang dituturkan oleh informan berikut:

“..kalo masalah komunikasi dan diseminasi ada di depkominfo.” (P3)

“..yang paling membedakan kita mungkin kita itu kan datangnya dari akar rumput, masyarakat..jadi bagaimana kita bekerja bersama masyarakat. Jadi tidak datang sebagai orang luar yang pintar terus mengasih kuliah di masyarakat, gak gitu teknisnya..kita lebih ke melihat kearifan lokal mereka...”(P6)

“...kita sudah punya pengalaman yang panjang...kita punya communication spesifik, latar belakang yang begitu panjang di media nasional dan internasional juga.... ketiga kita didukung kantor perwakilan kita, ada lebih dari 10 kantor perwakilan...jadi kalo kita membutuhkan kampanye nasional yang begitu massiv, menyebar luas, kita sudah punya tenaga-tenaga pendukung dan infrastruktur yang mendukung di bawah...” (P5)

Pembagian peran dalam mengembangkan kemitraan merupakan hal yang paling penting sehingga setiap mitra mengetahui peran atau tugas apa yang harus dijalankannya dalam menanggulangi permasalahan. Walaupun tidak ada pembagian peran secara tertulis, namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan didapatkan hasil bahwa setiap informan mengetahui apa peran dan fungsinya masing-masing. Adapun peran tersebut memang sesuai dengan keahlian yang mereka miliki.

“Karena unicef itu punya keunggulan di komunikasi dalam artian membuat strategi komunikasi untuk komnas sendiri dan salah satu tugas utama unicef misalnya mendukung berdirinya dan beropreasinya media center di komnas FBPI.. yang kedua mendukung berdiri dan beroperasi media center, di komnas FBPI, berarti media relation, hubungan media, press conference, press realease, semuanya kita advise termasuk website. Lalu ketiga kita juga memberikan usulan-usulan dan masukan-masukan dalam rangka membuat opini atau merespon pemberitaan...kita juga memberikan analisa, analisa kebijakan maupun analisa KAP, knowledge, action dan perception. Jadi kita memberikan masukan terhadap komnas dan pemerintah apa yang terjadi di masyarakat...” (P5)

”Peran promkes...satu menginformasikan kegiatan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang mau akan kita lakukan kepada para mitra, agar tersosialisasi, kedua dapat mungkin bisa juga diajak kerjasama, atau bisa saling sharing pengalaman...terus peran kita sebagai mengukur dari kacamata para mitra yg lain apakah kerja yang kita lakukan sudah baik atau masih perlu ditambah lagi dari temen-temen..ketiga mencari dukungan support dari temen-temen..kembali lagi kita gak bisa sendiri, kita perlu kemitraan..” (P2)

6.3.1.4 Pengalaman

Pengalaman merupakan faktor yang mampu mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia (SDM). Organisasi atau instansi yang memiliki pengalaman atau pernah bekerjasama berbasis kemitraan akan bisa menjalankan kemitraan tersebut lebih baik. Hal ini dikarenakan mereka dapat belajar dari pengalaman sebelumnya. Berdasarkan wawancara dari segi pengalaman dalam bentuk kerjasama berbasis kemitraan, seluruh informan menyatakan bahwa instansi mereka pernah dan bahkan masih membina kemitraan di luar kemitraan dalam penanganan flu burung. Bahkan, karena banyaknya kemitraan yang dijalin, informan tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Seperti yang dikatakan oleh informan di bawah ini:

"Banyak...banyak, contohnya BNN, BKK, kita dengan pramuka ada..itu punya Depkes..dengan institusi pemerintah pasti ya..swasta juga, banyak kita, jadi intinya swasta..LSM, pemuda, pemuda siaga, desa siaga..." (P2)
"Banyak sekali. Konsep kerjanya sebuah lembaga PBB, badan PBB, Unicef, UNDP, ILO, itu kemitraan..kita haryus bernitra dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah...dan berbagai pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah tsb." (P5)

Dalam model *Health Belief Model* (HBM), variabel pengalaman dibedakan dengan pengetahuan. Menurut Ismail (1990) perbedaannya terletak dalam sikap dan tanggapan serta penerimaan seseorang terhadap suatu penyakit. Adapun banyak peneliti yang mengelompokkan pengalaman sebagai bagian dari pengetahuan.

6.3.2 Jenjang atau Tingkat Kemitraan

Menurut Heideneim (2002), ada lima tingkat atau jenjang dalam suatu kemitraan yaitu *full collaboration*, *coalition*, *partnership*, *alliance*, dan *network*. *Full collaboration* sedangkan tingkat yang paling bawah adalah bentuk *network* atau jaringan kerja. Sedangkan diantaranya ada *coalition* atau koalisi, *partnership*, dan *alliance* atau aliansi.

Bentuk kolaborasi penuh merupakan tingkat atau jenjang tertinggi dimana terdapat kesepakatan tertulis, adanya pembagian visi, dan adanya pembagian tugas yang tertulis. Jenjang di bawahnya yaitu koalisi yaitu terdapat kesepakatan formal, semua anggota turut terlibat di dalamnya, adanya sumber daya baru, dan ada anggaran bersama. Pada tingkat *partnership*, terdapat kontrak formal, ada sumber daya baru, adanya pembagian risiko dan penghargaan. Aliansi merupakan bentuk semi formal, ada beberapa sumber daya baru, adanya koordinasi tugas, dan terakhir *network* yang memiliki ciri hubungan yang tidak terikat dan tidak ada manfaat/ keuntungan yang didapat secara signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan informan, dalam kemitraan di kelompok kerja komunikasi ini tidak ada kesepakatan formal atau yang tertulis, belum adanya pembagian visi dan peran secara jelas (tertulis), serta tidak ada anggaran bersama yang memang khusus dianggarkan dalam pengembangan kemitraan ini. Sehingga tingkat atau jenjang kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI ini bukan kolaborasi penuh, koalisi, ataupun *partnership* melainkan aliansi karena sesuai dengan ciri-cirinya yaitu bentuknya semi-formal, ada sumber daya baru, dan ada koordinasi tugas.

6.3.3 Faktor Pengelolaan Kemitraan

6.3.3.1 Dasar Hukum/Prosedur/Peraturan

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan *sponsorship*. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam SK bersama, MoU, Pokja, Forum Komunikasi, dan Kontrak Kerja/perjanjian kerja. Adapun forum komunikasi yang ada yaitu forum kelompok kerja komunikasi atau *working group communication*. Kemitraan kelompok kerja komunikasi ini tidak memiliki SKB (Surat Keputusan Bersama) ataupun MoU. SKB atau MoU ini merupakan suatu kesepakatan tertulis yang melandasi berjalannya kemitraan.

Kerjasama kemitraan dengan institusi non-pemerintahan dilakukan secara informal, untuk institusi berbadan hukum biasa dilakukan kesepakatan formal, dalam bentuk kesepakatan biasa (*memorandum of understanding/MoU*) atau kontrak yang mengatur pembagian tugas dan penggunaan dana untuk institusi bukan badan hukum. Biasanya akan lebih lancar kalau menggunakan pendekatan informal. Untuk kondisi ini, kesepakatan lisan juga dapat dilakukan (Ditjen PPM & PL). Berikut penjelasan dari informan mengenai SKB atau MoU:

"Gak ada...karena berkembang terus ya keanggotaan, dan jujur saja belum terpikirkan ke arah sana. Belum membuat SK bersama, belum."
(P1)

Adapun dengan sektor pemerintah, ada SK Menkokesra sebagai landasan dalam menjalin kemitraan.

"ya ada di SK itu kan dicantumkan...SK menkokesranya itu..." (P3)

Namun, untuk lembaga non-pemerintahan tidak ada SK atau MoU atau kontrak dalam kemitraan ini.

”..kalo namanya kita dengan komnas gak ada kontrak... Gak ada...itu Cuma kayak kontak-kontak aja... kalo KOMNAS dengan mitranya yang lain itu ada SKBnya...SKB kan policy-nya government indonesia...tapi terbatas sekali..kita sifatnya hanya memberikan bantuan teknis dan dana aja berdasarkan kebutuhan..” (P4)

6.3.3.2 Komunikasi Intensif

Komunikasi dalam bentuk kerjasama memiliki posisi kunci dalam menopang suksesnya sebuah program ataupun kegiatan. Maka kunci sukses dalam kemitraan adalah bagaimana setiap elemen mampu membangun komunikasi intensif baik dengan pertemuan maupun melalui cara lain. Tuntutan akan pentingnya komunikasi intensif dalam mengembangkan kemitraan menunjukkan diperlukannya jejaring atau mekanisme yang dapat menjamin terselenggaranya hubungan komunikasi satu sama lain.

Adapun komunikasi yang dilakukan dalam membangun kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI ini ada yang bersifat formal yaitu melalui forum yang diselenggarakan setidaknya 1 atau 2 bulan sekali, dan bersifat nonformal yaitu melalui media komunikasi seperti telepon dan email.

“Tiap hari...dengan telpon, dengan email..konsultasi itu tiap hari, kita bertukar agenda, kita bertukar undangan, kita bertukar ide, kita bertukar kendala... setiap kegiatan saling mengetahui lah..Kalo forum sebulan sekali rutin...yang ngadain Komnas.” (P1)

”Ya kita melalui surat, telepon, melalui diskusi2, seminar fgd, dan sebagainya..” (P3)

Forum *working group* yang telah terlaksana selama tahun 2006 hingga Juni 2008 adalah sebanyak 6 pertemuan yaitu pada tanggal 8 November 2006; 10 Mei, 1 Agustus, dan 5 November 2007; serta 28 Februari dan 13 Juni 2008. Forum ini belumlah terjadwal secara teratur karena diadakan bila ada keperluan atau kebutuhan saja seperti untuk koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi kegiatan. Yang mengatur pertemuannya adalah bidang komunikasi Komnas FBPI. Sebelumnya Komnas FBPI menghubungi tiap mitra untuk menanyakan jadwal kegiatan ke depan dan waktu kosongnya kapan saja. Setelah didapatkan waktu yang sesuai barulah Komnas FBPI mengirimkan undangan pertemuan. Seperti yang dituturkan oleh informan sebagai berikut:

"Tergantung kebutuhan. Itu biasanya yang memulai Komnas. Komnas yang ngatur. Untuk follow up kita tinggal telpon-telponan, email-email-an, any kind of communication kita jalani..." (P4)

"Gak tau itu komnas yang koordinator, kita undangan jadi gak teratur, gak dijadwal..biasanya nelpon dulu, ada waktu kosong kapan...baru kosong semua tanggal sekian baru ngirim undangan..." (P2)

Keaktifan tiap peserta dalam forum cukup tinggi menurut para informan. Hal tersebut dilihat dari kehadiran, partisipasi, dan antusiasme atau keaktifan dalam mengikuti forum.

"Tingkat partisipasinya tinggi...dilihat dari absensi..jadi, sampai ngomong kapan lagi nich kita kumpul..." (P1)

"Keaktifan di forum tinggi, dan kita komit semua..." (P3)

"Kalo saya lihat sih hampir sama ya semua karena kan semua juga punya program jadi semua harus bicara juga programnya apa..."(P6)

Berdasarkan notulensi rapat koordinasi, tingkat kehadiran dalam forum sebagai berikut:

Tabel 6.4 Kehadiran mitra dalam forum

No	Instansi	Tanggal					Persentase per peserta
		10 Mei 2007	1 Agust 2007	5 Nov 2007	28 Februari 2007	13 Juni 2007	
1.	Komnas FBPI	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2.	Deptan	✓	-	✓	✓	✓	80%
3.	Depkes	✓	-	✓	✓	✓	80%
4.	Depkominfo	✓	-	✓	✓	✓	80%
5.	CBAIC	✓	✓	✓	✓	✓	100%
6.	WHO	-	✓	✓	✓	✓	80%
7.	FAO	-	✓	✓	✓	✓	80%
8.	Unicef	✓	✓	✓	✓	✓	100%
9.	GTZ			✓	✓	✓	60%
10.	Muhammadiyah				✓	-	20%
Persentase Kehadiran per pertemuan		75%	62,5%	100%	100%	90%	

Tingkat kehadiran peserta di atas dihitung dari 5 pertemuan atau forum dari total 6 pertemuan, karena pada pertemuan pertama yaitu pada tanggal 8 November 2006, di dalam notulensi tidak ada daftar peserta yang hadir.

6.3.3.3 Saling Melengkapi Sumber Daya

Setiap instansi memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan mereka memiliki kekhasan keahlian tersendiri. Tak dapat dipungkiri juga bahwa tiap instansi memiliki kekurangan atau keterbatasan. Oleh karena itu, dalam kemitraan ini sangatlah diperlukan rasa saling melengkapi segala sumber daya. Apabila hal ini dapat terwujud maka segala hambatan yang menghadang akan dapat diminimalisir dan tujuan pun semakin cepat dicapai. Menurut semua informan yang diwawancarai, mereka menjawab dalam kemitraan ini ada saling melengkapi satu sama lain. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, data dan informasi, fasilitas-fasilitas seperti tempat. Misalnya, salah satu rapat koordinasi forum kelompok kerja komunikasi dilakukan di kantor unicef. Berikut petikan wawancaranya:

"Saling melengkapi dan saling mendistribusi.....peran dan tugasnya jadi saling membantu semua dalam rangka sosialisasi informasi itu, untuk meng-cover wilayah target yang begitu luas." (P3)

"Iya, saling melengkapi..." (P2)

Namun, saling melengkapi ini tidak dalam bentuk dana, karena dana disediakan dari sektor masing-masing. Belum ada dana khusus yang diperuntukkan dalam pengembangan kemitraan di bidang komunikasi Komnas ini.

Berikut penuturan informan:

"Sumber dana enggak. Ada beberapa peraturan yang sudah baku....antara satu organisasi dengan organisasi yang lain tidak bisa menutupi penganggaran..." (P5)

6.3.3.4 Wadah Koordinasi

Wadah koordinasi yang ada di dalam kelompok kerja komunikasi yaitu berbentuk forum atau rapat koordinasi. Selama ini telah berjalan 6 kali pertemuan baik untuk koordinasi, konsultasi, maupun konsolidasi kegiatan. Dari 6 pertemuan ini, 5 kali dilaksanakan di Komnas FBPI, sedangkan satu kali dilaksanakan di Unicef Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut dicatat dalam sebuah notulensi. Rincian mengenai forum kelompok kerja komunikasi sedikit digambarkan di bawah ini:

Tanggal 8 November 2006:

Rapat koordinasi terbatas ini dilakukan di sekretariat Komnas FBPI. Inti pembicaraan atau diskusi dalam rapat ini sebagai berikut:

- Penting dan perlunya kejelasan informasi untuk masyarakat mengenai flu burung
- Perlunya *massive campaign* yang mengakar rumput
- Masing-masing departemen memiliki sasaran yang berbeda
- Startegi komunikasi mencakup 3 hal yaitu *bird to bid*, *bird to human*, dan *pendemic prepadness*
- Perlunya ada harmonisasi dan sinergisme komunikasi
- Pesan tidak harus sama tapi filosofi pesan harus sama
- Membuat workshop komunikasi untuk menyatukan upaya komunikasi dan review kebijakan komunikasi yang telah dilakukan
- Adanya slogan nasional
- Ada satu slogan, satu *brand*, satu *image* dalam kampanye flu burung
- Adanya perhatian terhadap target *audience*

10 Mei 2007:

Pada tanggal 10 Mei 2007 ini merupakan rapat koordinasi penentuan arah KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Flu Burung 2007-2008. Rapat dilaksanakan di sekretariat Komnas FBPI dengan fasilitator dari Komnas FBPI. Jenis pertemuannya adalah presentasi dan konsultasi. Agenda yang dibahas yaitu penentuan brand dan rencana kerja komunikasi. Peserta yang hadir berjumlah 18 orang; 4 orang berasal dari Komnas FBPI, 2 orang dari CMU Deptan, 3 orang dari Depkes (2 dari promkes, 1 dari Puskom Publik), 2 orang dari Unicef, 3 orang dari Depkominfo, dan 4 orang dari CBAIC-USAID.

Pokok-pokok diskusi:

- Presentasi materi komunikasi tentang analisa komunikasi dan rekomendasi branding
- Rekomendasi *brand* yang dipakai "waspada" dan "tanggap"
- Adanya perbedaan pendapat mengenai dua brand ini. "Waspada dianggap kata yang umum sedang flu burung penyakit yang berbahaya sehingga harus berbeda dengan *tagline* penyakit lain. Kata "tanggap" dianggap kurang memberi solusi dan kurang dianggap serius oleh masyarakat.
- Pesan harus memperhatikan aspek sosial

1 Agustus 2007:

Pertemuan ini digagas oleh kelompok kerja komunikasi flu burung. Pertemuan dilaksanakan di kantor Unicef Indonesia, di wisma metropolitan II Lt. 10 Jakarta. Jenis pertemuannya adalah konsultasi dan koordinasi. Fasilitatornya adalah Unicef Indonesia. Peserta yang hadir ada 10 orang, terdiri dari 1 orang dari

Komnas FBPI, 4 orang dari Unicef Indonesia, 2 orang dari FAO Indonesia, 1 orang dari WHO, dan 2 orang dari CBAIC.

Topik agenda yang dibahas yaitu rencana pengembangan ”tangan kiri” kampanye tanggap flu burung dan pengembangan serial edukasi kartun anak-anak pencegahan flu burung. Hasil yang didapatkan dari pertemuan kelompok kerja komunikasi ini adalah persetujuan 4 pesan tangan kiri yaitu pakai sarung tangan dan tutupi mulut dan hidung dengan kain saat memegang unggas; sembelih, bakar, dan kubur unggas yang sakit atau mati; jangan makan unggas sakit atau mati; dan jangan biarkan anak-anak bermain dengan ayam, bebek, dan unggas lainnya. Selain itu juga mengenai serial edukasi kartun anak-anak sudah dapat dilanjutkan ke proses produksi dan secepatnya didistribusikan. Dari segi materi sudah baik karena target utama anak-anak maka penyajiannya menarik.

5 November 2007

Rapat dilaksanakan di sekretariat Komnas FBPI dengan pengagas pertemuan dari Komnas FBPI. Jenis pertemuannya adalah konsultasi. Peserta yang hadir berjumlah 21 orang yaitu 3 orang dari Komnas FBPI, 1 orang dari Deptan, 4 orang dari Unicef Indonesia, 4 orang dari CBAIC, 2 orang dari Depkes, 1 orang dari CDC, 1 orang dari WHO, 3 orang dari FAO, 1 orang dari GTZ, dan 1 orang dari Depkominfo.

Topik agenda yang dibahas yaitu rencana pengembangan website Komnas FBPI dan rencana media buying dan placement, pengembangan materi presentasi PATA, dan beberapa isu tambahan. Hasil yang didapatkan yaitu pertama Komnas FBPI akan mengembangkan website dan tetap bekerjasama dengan Unicef dalam

pengelolaan content-nya. Kedua, untuk rencana *placement/media buying*/penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan anggaran yang dimiliki Komnas FBPI, CBAIC akan menyediakan bahan ILM untuk TV dan radio dengan tema *ter-update* berdasarkan diskusi komunikasi terkini (bakar dan kubur, laporkan), sedangkan Unicef menyediakan bahan ILM TV kartun untuk anak-anak. Ketiga, isu-isu seperti Promkes Depkes melaporkan KIE melalui TV, Komnas FBPI melaporkan kualitas pemberitaan mulai baik, berita sudah disisipkan pesa-pesan pencegahan, UUP-AI melaporkan bahwa koordinasi pelaporan dan konformasi kasus flu burung dengan posko AI semakin baik dan akan lebih baik bila dikembangkan dengan *joint press release*. Dari WHO melaporkan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang dan banyaknya kasus akhir karena keterlambatan pasien dirawat dan petugas kesehatan yang kurang tanggap. Forum sendiri menanggapi status *working group* ini apakah sebagai sekedar forum koordinasi saja atau bisa menjadi forum konsultasi inisiatif lembaga yang melaksanakan kegiatan KIE, atau sebagai *steering committee* dalam memberi persetujuan inisiatif-inisiatif kegiatan KIE Indonesia. Selain itu juga forum mempertanyakan arah gerak dan kewenangan *working group communication* dalam menentukan kebijakan komunikasi flu burung.

28 Februari 2008:

Rapat koordinasi bidang komunikasi Komnas FBPI ini dilaksanakan di sekretariat Komnas FBPI dengan fasilitator bidang komunikasi Komnas FBPI. Jenis pertemuannya adalah konsultasi dan konsolidasi kegiatan komunikasi Komnas FBPI dan stake holder. Peserta yang hadir berjumlah 21 orang, masing-

masing dari instansi Komnas FBPI berjumlah 3 orang, 3 orang dari Unicef, 4 orang dari CBAIC, 2 orang dari PP Muhammadiyah, 3 orang dari GTZ, 1 orang dari Depkes, 1 orang dari Deptan, 1 orang dari Depkominfo, 1 orang dari FAO, dan 2 orang dari WHO.

Hasil diskusi pada pertemuan ini yaitu pertama, terbentuknya tujuan pertemuan koordinasi komunikasi untuk koordinasi komunikasi, sharing informasi, kolaborasi penyebaran informasi, forum diskusi, dan penyelarasan kegiatan komunikasi. Kedua, mengenai update informasi situasi flu burung Indonesia yaitu 129 kasus konfirmasi dan 105 meninggal (per 25 februari 2008). Ketiga, ruang lingkup Komnas FBPI yaitu kegiatan publikasi dan kehumasan, kegiatan publik dan pemberdayaan masyarakat, dan kampanye media, dan disampaikan juga mengenai kegiatan-kegiatan berdasarkan ruang lingkup kegiatan komunikasi yang akan ditindaklanjuti Komnas FBPI. Keempat, adanya presentasi komunikasi Komnas FBPI mengenai konferensi internasional "*Community, Private, and Public Partnership in AI Control and Pandemic Preparedness.*", sosialisasi pemberdayaan ibu rumah tangga, penyusunan panduan komunikasi penanggulangan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, lokakarya pemberdayaan media, rapat koordinasi regional Indonesia wilayah timur, respon komunikasi dan sosialisasi tanggap flu burung, kampanye media, produksi bahan sosialisasi dan KIE, produksi video panduan penanggulangan flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, pengembangan sistem informasi berbentuk website dan peta surveillance AI. Kelima, adanya critical point setiap kegiatan komunikasi Komnas FBPI dan kebutuhan dan ajakan kerjasama dan/atau koordinasi.

13 Juni 2008:

Rapat koordinasi ini dilaksanakan di sekretariat Komnas FBPI. Peserta rapat yang hadir berjumlah 19 orang yaitu 3 orang dari Komnas FBPI, 2 orang dari Depkes, 1 orang dari Deptan, 1 orang dari Depkominfo, 2 orang dari WHO, 3 orang dari FAO, 1 orang dari Unicef, 4 orang dari CBAIC, dan 2 orang dari GTZ.

Agenda yang dibahas pada rapat ini yaitu:

1. Sharing informasi kegiatan dan program KIE dua bulan mendatang
2. Konsultasi dan diskusi revisi buku panduan flu burung dan pesan utama
3. Sharing informasi isu-isu baru

Dalam pertemuan ini output atau keluaran yang didapatkan sebagai berikut:

1. Keselarasan kegiatan dan program 2 bulan mendatang
2. Kesepakatan revisi panduan, bentuk revisi dan penyusunannya
3. Pemahaman terhadap isu-isu baru serta program partner komunikasi Komnas FBPI

6.3.3.5 Peredaan Masalah dan Konflik

Untuk mewujudkan cita-cita dan implementasi kemitraan bukan berarti tanpa kendala dan rintangan. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari belum kondusifnya iklim bermitra, kesadaran yang masih rendah oleh kedua belah pihak (mitra besar maupun kecil) atau juga karena terdapatnya kelemahan di bidang SDM, modal, teknologi, informasi maupun organisasi dan manajemen.

Dalam kemitraan kelompok kerja komunikasi ini berdasarkan wawancara dengan seluruh informan masalah atau hambatan yang ada lebih banyak dalam hal koordinasi, bagaimana menyatukan kesepakatan dan pandangan. Koordinasi

merupakan suatu pengaturan tata hubungan untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Seperti yang dituturkan oleh informan berikut:

"Kebanyakan dari internal, biasa overlap kegiatan, perbedaan kepentingan, perbedaan filosofi, menyatukan kesepakatan kadang lama dan susah tapi kebanyakan dioverlap aja..." (P1)

"Kalo di working group kayaknya sejauh ini fine-fine aja ya, paling nanti dari segi koordinasinya aja sih. Karena memang gak gampang kan koordinasi, kordinasi kan paling sulit.." (P6)

"Kalo dengan Komnas relatively tidak ada masalah. Karena kita sudah membangun hubungan interpersonal yang bagus. Tapi dengan donor yang lain kita melihat...mereka punya kesibukan dan mandat sendiri. Jadi kadang2 waktu yang digunakan untuk saling bertukar informasi itu kurang." (P4)

Timbulnya suatu konflik atau masalah tanpa kita sadari dapat memberikan manfaat secara positif, dimana konflik sebenarnya merupakan suatu bekal yang dapat membawa diri kita untuk maju. Namun dengan catatan harus ditangani sejak dini dengan cara yang tepat dan penuh perhitungan. Konflik merupakan persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain; keadaan atau perilaku yang bertentangan (misalnya: pertentangan pendapat, kepentingan, atau pertentangan antar individu); perselisihan akibat kebutuhan, dorongan, keinginan, atau tuntutan yang bertentangan. Adapun masalah atau konflik yang pernah terjadi dalam kemitraan di kelompok kerja komunikasi adalah mengenai perbedaan pendapat yang diiringi ke-egosentrisan instansi atau organisasi dalam *branding* kampanye nasional flu burung. Namun, masalah tersebut sudah dipecahkan bersama-sama.

"Ketegangan-ketegangan, ego antar lembaga itu sudah dilewati tahun 2007...tadinya awalnya hanya ada dua kampanye yang diakui tanggap flu burung dan waspada flu burung..sejak awal tahun ini depkes mengakui bahwa sekarang sudah pakai tanggap flu burung..jadi intinya sudah single

brand...dengan adanya single brand berarti selesai permasalahan egosentris, ego antar lembaga itu sudah selesai” (P5)

”Kalo hambatan lebih pada arogansi keilmuan dari lembaga2 internasional atau bahkan departemen pemerintah yang merasa kalo departemen dia lebih pantas nanganin AI dibandingkan departemen lain. Itu arogansi. Arogansi itu yang harus dikurangi...” (P4)

Penyelesaian masalah tersebut lebih kepada bagaimana mengkomunikasikannya kepada seluruh mitra sehingga dapat dicari penyelesaiannya secara bersama-sama. Pada akhirnya memang diperlukan sikap saling menghargai antar mitra juga terhadap komitmen kesepakatan.

”Solusinya sich semua hanya di komunikasi aja..kalo sudah bertemu kalo sudah dibicarakan pasti ketemu solusinya..untuk masalah overlap atau masalah2 program yang tidak selaras itu yang agak sulit untuk diambil solusinya..gitu..” (P1)

”Biasanya stiap kasus selalu dibahas, ada namanya project meeting disini, itu kita membahas teknis di lapangn, terus juga cari pemecahannya, bisa dalam bentuk mengembangkan konsep baru, busa dengan saling ngasih bantuan teknis...” (P4)

6.3.3.6 Monitoring dan Evaluasi

Sebuah kegiatan baik skala besar maupun kecil tetap memerlukan pemantauan dan evaluasi agar sekecil apapun kelemahan dan kekurangannya dapat diatasi secara lebih dini. Hal ini dikarenakan melalui pemantauan dapat diperoleh masukan agar secara terus menerus secara bertahap dapat dilakukan perbaikan dan penataan sehingga banyak pihak yang terpuaskan atas setiap layanan, gerak dan langkah para pengelola kemitraan.

Berdasarkan wawancara, seluruh informan mengatakan bahwa tidak ada bentuk monitoring atau evaluasi khusus dari kemitraan komunikasi. Monitoring

dan evaluasi dilakukan sendiri-sendiri oleh tiap instansi yang saling bekerjasama. Namun, sebenarnya forum-forum yang ada perlu terus dikembangkan karena pada hakekatnya dapat dijadikan sebagai peluang dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Selain itu juga sekaligus untuk membuat *feed back* kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan kemitraan.

“Gak ada, karena hanya forum aja tidak melakukan suatu kegiatan...forum ngobrol..bubar.” (P4)

”Kalo kita ada, kalo di working group saya gak tahu ya gimana evaluasinya, karena programnya tidak bersama, tapi kalo di setiap program ada monitoring dan evaluasi kan.” (P6)

”Masing-masing nanti, bukan dari forum dari KOMNAS...ya pasti lapor..kita melaksanakan UKS misalnya..hasilnya kasih KOMNAS...” (P2)

6.3.3.7 Manfaat Kemitraan bagi tiap Instansi

Kemitraan akan berjalan bila pihak-pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat. Walaupun pada jangka pendek, ada pihak atau salah satu pihak memperoleh manfaat lebih banyak dari pihak lain. Tetapi itu adalah satu proses untuk mewujudkan kemitraan yang ideal. Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan atau setiap mitra mendapatkan manfaat maka kemitraan akan bertahan lebih lama, tetapi hubungan tersebut akan putus jika salah satu pihak merasa (persepsi subyektif, tidak selalu nyata) dirugikan (Sarwono, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan-informan, seluruhnya mengatakan bahwa instansinya mendapatkan manfaat dari kemitraan ini.

"Banyak...banyak...bahan-bahan kampanye keluar banyak tersebar di seluruh desa banyak orang yang mengerti flu burung, banyak telpon dari daerah untuk membauat sosialisasi.. tanpa kemitraan gak bisa jalan.." (P1)

"Ya, kita bisa terbantu dari segi finansial, dari segi SDM, dari segi teknis, banyak sekali manfaatnya, jadi kerjanya gak sendiri kan? coba depkes sendiri...mabok kita kalo kerja sendiri..gak bisa.." (P2)

"Ya masyarakat memahami terhadap masalah flu burung, melakukan, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku dalam penanganan dan pencegahan flu burung" (P3)

"Kita lebih dapat arah yang jelas mau kemana sih komunikasi flu burung di indonesia, yang kedua kita lebih bisa menghemat uang karena bisa menghindari overlapp, jadi lebih cost effective, terus yang ketiga kita berharap impactnya lebih tinggi.." (P4)

"Satu koordinasi kerja2 yang lebih erat dengan Komnas, kedua koordinasi kegiatan sangat membantu kita untuk melakukan pemetaan agenda kegiatan... Berikutnya timbul komunikasi yang intens antar officer atau spesialis di working group itu. Itu kan sangat penting hubungan interpersonal antar mitra itu menentukan kerja kita harmonis atau gak." (P5)

"Kalo secara fisik mungkin enggak ya, tapi secara informasi banyak ya..jadi kadang2 pengalaman dari temen2 di beberapa daerah itu bisa kita jadikan bahan pertimbangan kita juga gitu..jadi gak perlu melakukan kesalahan. Karena kan temen kita sudah melakukan kesalahan disana, jadi jaga2 jangan sampai terjadi lagi.." (P6)

6.3.4 Pengembangan dan Keberhasilan Kemitraan

Keberlangsungan atau sustainabilitas sebuah kemitraan dapat berupa tindak lanjut dari kemitraan itu sendiri. Menurut Indrajit (2006) keberlangsungan ini hanya akan terjadi apabila sejumlah faktor kunci diperhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu:

- Kepercayaan dan kesungguhan untuk berhasil yang tinggi di antara mereka yang bermitra (*trust, faith, and passion*);
- Eksekusi yang konsisten dan kontinyu, dalam arti kata tidak mudah menyerah atau mudah mengganti-ganti pendekatan setiap menemukan berbagai kendala teknis;
- Secara periodik melakukan proses "*Plan-Do-Check*" terhadap manfaat aliansi ditinjau dari kacamata masing-masing organisasi yang bermitra secara transparan, tidak perlu ditutup-tutupi terhadap berbagai kekecewaan yang timbul (tentu saja untuk dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya);
- Selalu melakukan inovasi "rumah tumbuh" yang tidak berkesudahan karena kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah dari waktu ke waktu; dan
- Proses penyelenggaraan kemitraan yang menjunjung nilai-nilai profesional dan etika

yang tinggi.

Kesepakatan tindak lanjut dari kemitraan kelompok kerja komunikasi belum ada. Ada yang menjelaskan bahwa instansi tidak membuat tindak lanjut karena akan tutup dalam bulan tertentu seperti penuturan informan sebagai berikut:

“Gak ada tindak lanjut.. rencana lanjutan belum ada karena karena CBAIC akan tutup bulan Juli, tapi akan diperpanjang cuma belum buat perencanaan...” (P4)

Adapula yang tidak tahu tindak lanjut dari hubungan kemitraan ini nantinya akan seperti apa dikarenakan masa tugas Komnas FBPI adalah 4 tahun terhitung sejak diberlakukannya Perpres No.7 Tahun 2006.

“Saya gak tahu kalau isu yang saya dengar Komnas kan tidak ada, dia berubah di bagian penyakit menular kan, ya saya gak atahu nantinya gimana” (P6)

Salah satu informan mengatakan bahwa tindak lanjut dari kemitraan ini adalah kerjasama dengan instansi lain yang sejalan sasaran dan tempat. Selain itu juga tindak lanjutnya adalah aksi konkrit di lapangan dan diharapkan ke depannya ada pemetaan kegiatan selama kurun waktu tertentu Berikut penuturannya:

“Tindak lanjutnya adalah kerjasama...menjalin kemitraan, kerjasama sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing..bukan semua harus bekerja bersama, mungkin bisa 4-5 institusi, tidak belasan.....intinya kerjasama melakukan kegiatan pencegahan flu burung sama-sama..bisa jadi persamaan visi, kesamaan sasaran, kesamaan tempat.. karena kesamaan semua itu maka dia kerja sama...” (P2)

”Sebenarnya aksi konkrit di lapangan. Kalo bisa terjadi pemetaan kegiatan. Konkritnya adalah kesinambungan selama satu tahun . pemetaan agenda aktivitas berarti bisa kesinambungan satu tahun. Kalo kita bisa menyepakati waktu pembagian waktu kegiatan” (P5)

Komnas FBPI sebagai koordinator dalam kemitraan ini mengemukakan tindak lanjutnya sebagai berikut:

“Potensi-potensi yang ada dalam anggota ini bisa berkesinambunagn di amsa yang akan datang misalnya Komnas selesai 2010..tapi dari embrio

yang udah kita bikin itu menajdi forum yang bagus untuk mengalihkan isu2 yang laibn..jadi nii membentuk ikatan yang kuat diantara kita..jadi embrio iuni dapat dipakai diomana-mana..tindak lanjutnya ya itu..ertu mengembangkan hubunagn, terus mengembangkan kegiatan bersama, memastikan masyarakat mendapat informasi...” (P1)

Sebagian besar informan yang diwawancara mengatakan bahwa kemitraan kelompok kerja komunikasi ini sudah berhasil, namun mereka menyebutkan keberhasilan tadi masih harus ditingkatkan lagi. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari input, proses, output, dan outcome. Indikator input diukur dari tiga indikator, yaitu terbentuknya tim wadah atau secretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan, adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukan bagi pengembangan kemitraan, adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit flu burung. Adapun menurut para informan kemitraan yang mereka jalani sudah cukup berhasil namun belum sempurna.

..Kemitraan yang sekarang ini menurut saya sudah berhasil.. sudah solid sekali..alangkah baiknya bila lebih diperluas dari stake holdernya, dari mitranya...nah, kalo misalnya lebih banyak lagi LSM atau NGO yang bergabung kita optimis aja...udah banyak program pemberdayaan masyarakat yang berjalan jadi sudah berhasil namun diperluas lagi jaringannya.. (P1)

”Berhasil, jalan,bagus buktinya indikatornya pesertanya bertambah, banyak hal-hal yang kita terbantu...ada kelancaran kegiatan, CBAIC punya kegiatan, promkes, deptan punya kegiatan....itu semua jadi lancar,

kita punya koneksi, kita punya informasi kurang jelas tentang unggas kita bisa hubungi langsung..” (P2)

”Saya senang dengan KOMNAS, saya senang, kalo berhasil 100% masih belum..” (P4)

”Berhasil tapi belum sempurna.. dibidang berhasil, berhasil memulai proses, karena agak sulit memulai proses.”. (P5)

Namun, ada satu informan yang tidak mau menilai karena beranggapan bila dia yang menilai maka akan jadi subjektif penilaian keberhasilan ini.

”Ya, yang lain yang menilai itu bukan kita kalo kita yang menilai subjektif itu namanya” (P3)

6.3.5 Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Komunikasi Komnas FBPI

6.3.5.1 Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Berdasarkan *Re-focusing* Rencana Strategis Nasional Pengendalian Flu Burung (*avian influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza tahun 2006-2008, dalam pencegahan dan penanggulangan flu burung ada 6 strategi yang diurut berdasarkan prioritas, yaitu :

1. Informasi, sosialisasi, komunikasi dan edukasi
2. Restrukturisasi peternakan
3. Surveilans epidemiologi
4. Penanganan virus pada sumbernya : pengendalian penyakit pada hewan melalui biosekuriti, vaksinasi, dan *culling*+kompensasi,
5. Peningkatan dan pemberdayaan layanan kesehatan,

6. Kesiapsiagaan dan simulasi pandemi

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) menjadi prioritas pertama karena KIE mengenai flu burung sangat penting dalam menumbuhkan *public awarness* demi menanggulangi dan mencegah menyebarnya flu burung di Indonesia.

6.3.5.1.1 Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Tujuan KIE dalam strategi Nasional Pengendalian Flu Burung yaitu:

1. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk menanggulangi AI/Flu Burung
2. Mendiseminasi pengetahuan tentang AI/Flu Burung kepada masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut aktif dalam surveilans, membangun networking terutama pada peternak skala menengah dan kecil dalam penanggulangan AI/Flu Burung.
4. Membangun citra Indonesia di dunia internasional tentang upaya yang telah dilakukan

Adapun target yang ingin dicapai dalam strategi KIE ini yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang AI/Flu Burung
2. Terciptanya jaringan masyarakat untuk melakukan surveilans dan pencegahan di setiap desa, kecamatan dan kabupaten/kota
3. Terbentuknya organisasi pengusaha ternak skala kecil dan menengah di setiap propinsi

4. Meningkatnya citra Indonesia dalam pengendalian AI/Flu Burung

Setiap kegiatan pokok dalam strategi Nasional Pengendalian Flu Burung dalam bidang KIE ada indikator capaian dan juga instansi yang bertanggungjawab dalam startegi tersebut.

Tabel 6.5 Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Kegiatan Pokok	Indikator Capaian	Instansi PJ
Pengembangan komunikasi publik untuk mendiseminasikan cara pencegahan dan pengendalian flu burung	Frekuensi dan kualitas komunikasi yang dilakukan	Kominfo, Deptan, Depkes
Pembentukan organisasi peternak skala kecil	Tersusun dan terdaftarnya organisasi peternak	Deptan
Penyuluhan dan pelatihan masyarakat dalam surveilans dan pencegahan flu burung	Jumlah penemuan kasus AI oleh masyarakat	Deptan, Depkes, Kominfo
Bina suasana terhadap kelompok khusus (legislatif, pelajar, pendidik, LSM, masyarakat, komunitas kesehatan/veteriner, komunitas perdagangan, komunitas peternak)	Jumlah kelompok khusus yang disuluh	Deptan, Depkes, Kominfo

6.3.5.1.2 Strategi Kebijakan Nasional Kesiapsiagaan Pandemi Influenza

Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Tujuan:

1. Memberikan informasi, edukasi dan komunikasi risiko terhadap seluruh lapisan masyarakat agar waspada dan tidak panik dalam menghadapi KLB flu burung dan kemungkinan terjadinya pandemi influenza.

2. Meningkatkan kemampuan komunikasi risiko bagi tenaga teknis kehumasan, penyuluhan, media massa dan elektronik.

Target:

1. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam mengantisipasi KLB flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan pandemi influenza.
2. Kampanye nasional tentang pencegahan dan penanggulangan flu burung, dan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya

Tabel 6.6 Strategi Kebijakan Nasional Kesiapsiagaan Pandemi Influenza

Kegiatan Pokok	Indikator Capaian	Instansi Penanggungjawab
Perumusan strategi komunikasi risiko	Ada strategi Nasional Komunikasi risiko	Depkominfo
Pembentukan Pusat Informasi Nasional	Ada Pusat Informasi Nasional	
Pembuatan media KIE: cetak dan elektronik	Tersedia media KIE	Depkominfo
Pembuatan jaringan komunikasi di antara semua mitra dan lembaga internasional (WHO, FAO, OIE, dll)	Ada jaringan kerjasama komunikasi	
Komunikasi massal publik (masyarakat umum)	KIE media massa dan elektronik	Depkominfo, Depkes
Komunikasi dan Informasi pada kelompok risiko tinggi dan kelompok strategis	KIE di risti dan kelompok strategis	Deptan, Menkokesra, Bappenas

6.3.5.2 Komunikasi Komnas FBPI

Tujuan kegiatan komunikasi Komnas FBPI adalah:

1. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk menanggulangi flu burung.
2. Mendiseminasi pengetahuan tentang flu burung kepada masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat untuk ikut aktif dalam surveilliance, membangun jaringan kerja pada seluruh pihak yang lintas sektoral, dunia usaha, dan masyarakat nasional dan internasional dalam upaya peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.
4. Membangun citra Indonesia di dunia Internasional tentang upaya yang telah dilakukan

Sasaran kegiatan komunikasi Komnas FBPI antara lain:

1. Masyarakat secara umum dan khusus seperti: ibu rumah tangga, peternak, siswa sekolah, dan sebagainya yang memiliki risiko tinggi terhadap flu burung
2. Pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga – lembaga, instansi pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan
3. Pihak swasta, badan usaha, dan industri yang berkaitan dengan dampak flu burung dan pandemi influenza terhadap kelangsungan usahanya
4. Lembaga, organisasi, termasuk masyarakat internasional yang memiliki perhatian tertentu terhadap Indonesia dalam hal pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza
5. Media massa nasional dan internasional

Adapun output yang diharapkan dalam bidang komunikasi Komnas FBPI yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

2. Merangsang awareness masyarakat untuk dapat menghasilkan inisiatif kegiatan pencegahan dan penanggulangan flu burung
3. Tumbuhnya peran serta dan kerjasama seluruh pihak, bahwa flu burung bukanlah salah siapa-siapa, tetapi tanggung jawab bersama
4. Diperoleh dukungan pemerintah pusat
5. Terwujudnya perubahan perilaku, memberikan kesadaran bahwa kegiatan pencegahan flu burung harus dilakukan segera dan saat ini
6. Berkembangnya opini, meningkatkan kualitas komunikasi di masyarakat akan meningkat
7. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik mengenai bahaya FB dan upaya pemerintah
8. Meningkatnya perhatian seluruh pihak, termasuk dunia internasional, citra Indonesia merupakan hal penting
9. Berkembangnya reaksi dan aksi nyata masyarakat, karena media merupakan kontrol publik paling efektif
10. Mewujudkan kebijakan dan keputusan, daripada eksekutif dan legislatif dalam rangka pengendalian flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza

6.3.5.3 Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi

Instansi lintas sektor yang bertanggung jawab dalam KIE berdasarkan strategi dalam Renstranas AI dan PI Tahun 2005-2008 adalah Depkominfo, Deptan, dan Depkes. Namun dalam operasionalnya setiap departemen yang lain juga harus turut berperan dalam penanganan flu burung. Hal ini ditegaskan dalam

Perpres No.7 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa yang turut berperan dalam pengendalian flu burung yaitu menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, menteri koordinator bidang ekonomi, menteri kesehatan, menteri pertanian, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri kehutanan, menteri penindustrian, menteri perdagangan, menteri perhubungan, menteri pendidikan nasional, menteri kebudayaan dan pariwisata, menteri komunikasi dan informatika, menteri negara riset dan teknologi, menteri negara lingkungan hidup, menteri negara perencana pembangunan nasional, panglima tentara nasional indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, ketua palang merah indonesia.

Sama halnya dengan organisasi baik internasional maupun lokal yang diharapkan juga ikut serta dalam penanganan flu burung karena masalah kesehatan bukan hanya milik pemerintah atau sektor kesehatan saja melainkan tugas dan kewajiban setiap sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini juga dikemukakan oleh para informan sebagai berikut:

"Jadi intinya adalah peran masyarakat sangat penting dalam penanganan flu burung. Masyarakat ini dalam pengertian masyarakat secara individu masupaun kelompok, baik keluarga dengan Rt-nya Rw-nya..bukan dari level atas tapi dari level bawah." (P2)

"Banyak sebetulnya harus terlibat...diknas harus terlibat kan, depkes sudah jelas, deptan sudah jelas, koperasi juga harus terlibat, termasuk departemen pertahanan harus terlibat dari sekarang karena kalo nanti terjadinya pandemi, bahkan imigrasi pun harus terlibat.." (P6)

"Semua....dari polisi, TNI, pemerintah daerah, pemerintah lokal, deplu segala, itu untuk isu pandemik penting banget..LSM kayak PMI dan Muhammadiyah..." (P4)

"Semua orang, semua sektor, semua instansi.. semua instansi pemerintah dan unit2nya di dalamnya sangat penting untuk ikutan mencegah flu burung...karena ini kompleks masalahnya ya kan... terus yang tidak kalah peting private sector...." (P5)

Wadah Koordinasi dalam bidang Komunikasi Komnas FBPI bernama kelompok kerja komunikasi atau *working group communication*. Instansi-instansi yang terlibat dalam kelompok kerja komunikasi Komnas FBPI ini terdiri dari departemen-departemen milik pemerintah dan dari organisasi (LSM/NGO) internasional dan lokal. Instansi-instansi tersebut yaitu:

1. Departemen Kesehatan (Promosi Kesehatan dan Pusat Komunikasi Publik)
2. Departemen Pertanian (*Campaign Management Unit/CMU* Deptan)
3. Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo)
4. Unicef Indonesia
5. WHO (*World Health Organization*) Indonesia
6. FAO (*Food Agriculture Organization*) Indonesia
7. *Community Based Avian Influenza Control (CBAIC)*
8. PP Muhammadiyah

Berdasarkan data tersebut maka lintas sektor yang telah berperan dalam penanganan flu burung di bidang komunikasi dan telah terorganisir oleh Komnas FBPI adalah Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Sedangkan organisasi internasional terdiri dari WHO, FAO, Unicef, dan CBAIC; dan organisasi lokal yaitu PP Muhammadiyah.

BAB VII

PEMBAHASAN

7.1 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian mengenai gambaran kemitraan lintas sektor dan organisasi dalam upaya penanganan flu burung di bidang komunikasi Komnas FBPI ini, yaitu antara lain:

- a. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sehingga ada kemungkinan peneliti tidak dapat menghindari subyektifitas dalam menginterpretasi makna yang tersirat dari informan atau data yang ada. Akan tetapi, peneliti berupaya untuk menjaga akurasi data dan kualitas hasil penelitian dengan mengadakan pemeriksaan silang dari informan yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Ketidaktepatan jawaban akibat kekurangpahaman informan mengenai pertanyaan, hal ini dapat disebabkan pertanyaan yang kurang jelas. Untuk mengatasinya peneliti melakukan pengulangan pertanyaan dan memberikan penjelasan dengan kalimat lain.
- c. Peneliti tidak bisa menemui beberapa pejabat lintas sector yang selama ini sering hadir dalam pertemuan dengan Komnas FBPI sehingga terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan kesibukan beliau yaitu dinas di luar pada waktu pengambilan data.

7.2 Pembahasan

7.2.1 Faktor Pelaku Kemitraan

7.2.1.1 Pengetahuan tentang Flu Burung

Mengatasi persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat, tenaga profesional kesehatan masyarakat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khusus (McKenzie, 2007). Sebagai tim komunikasi yang bertugas menyampaikan informasi mengenai flu burung kepada masyarakat, akan sangat diperlukan sekali pengetahuan tiap mitra mengenai flu burung ini karena mereka sebagai sumber informasi. Bila sumbernya salah maka dapat dipastikan sasaran komunikasi pun akan menangkap hal yang salah.

Pengetahuan sebagian besar informan lintas sektor mengenai flu burung, baik secara pengertian maupun cara-cara pencegahan supaya tidak tertular virus ini, sudah baik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pelaku kemitraan di instansi terkait. Seluruh informan menyebutkan bahwa penyebab flu burung adalah virus H5N1 yang menjangkiti unggas dan dapat menular ke manusia melalui sentuhan dengan ludah, kotoran unggas yang terjangkit virus tersebut. Semua informan sepakat bahwa perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara yang efektif dalam mencegah penularan virus ini.

Informan-informan mengetahui segala hal mengenai flu burung yaitu dari segi pengertian dan pencegahan karena beberapa memang berada di instansi yang fokus pada masalah flu burung, atau terdapat bidang di instansinya yang memberikan perhatian lebih ke penyakit flu burung ini. Selain itu, mereka juga mendapatkan berbagai informasi dari media elektronik dan cetak seperti internet, majalah, jurnal, koran, dan lain sebagainya.

Pengetahuan yang kurang akan mengakibatkan kekurangmampuan dalam menerapkan suatu keterampilan (Notoarmodjo, 2003). Dengan pengetahuan yang baik terhadap pengetahuan mengenai penyakit flu burung ini, diharapkan dapat mempengaruhi mitra dalam mengambil inisiatif sendiri dalam melaksanakan kegiatannya dan dapat menerapkan keterampilannya dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Rafianto (1985) bahwa penambahan pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil inisiatif sendiri terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

7.2.1.2 Pemahaman Kemitraan

Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Eisler dan Montuori (1997) menyatakan bahwa memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.

Hasil wawancara dengan informan mengenai pemahaman mereka tentang kemitraan menghasilkan informasi bahwa setiap informan beranggapan kemitraan adalah suatu hubungan yang sejajar atau equal atau disebut juga kesetaraan. Padahal tidak sekedar itu saja, karena kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (Ditjen PPM & PL, 2003). Dari 6 informan, ada satu informan

yang menyatakan hal tersebut dengan lengkap yaitu terdapat tiga prinsip dalam kemitraan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Dalam kemitraan di kelompok kerja komunikasi ini, para informan merasa sudah terbuka dengan mitra lainnya. Hal ini didasarkan atas kesediaan mereka dalam memberikan data yang dibutuhkan, seperti data kasus penyakit flu burung pada manusia dan hewan, data kegiatan institusi, ataupun sharing pengalaman di lapangan ketika mereka melakukan kegiatan, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang menutup-nutupi. Penilaian instansi yang satu terhadap instansi yang lainnya pun sebagian besar cukup positif dengan mengatakan bahwa mitra lain juga terbuka. Dengan adanya saling percaya antara mitra dapat lebih mempererat hubungan di antara mereka sehingga kemitraan pun akan berkembang.

Adanya kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplotasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan. Hal inilah yang diharapkan dapat tercipta dalam kelompok kerja komunikasi yaitu dengan prinsip bahwa setiap mitra sejajar kedudukannya maka semua pihak akan merasa puas dengan kemitraan tersebut.

Menurut Depkes (2003) tujuan dari kemitraan adalah meningkatkan percepatan, efektifitas, dan efisiensi dalam upaya penanganan, dalam hal ini penanganan flu burung. Adapun tiap mitra ketika diwawancarai memiliki tujuan masing-masing yang intinya untuk menurunkan kasus flu burung melalui pengetahuan masyarakat. Karena menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan memiliki pengaruh sebagai motivasi awal bagi seseorang dalam berperilaku.

Walaupun sebenarnya masih ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku seseorang. Semua tujuannya mengarah kepada masyarakat, dimana masyarakat diharapkan dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan terjangkitnya virus flu burung ini melalui pengetahuan mereka terhadap penyakit ini.

7.2.1.3 Keahlian dan Kesepakatan Peran

Kemitraan yang sebenarnya adalah bagaimana memadukan perbedaan keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain, idealnya dalam kerangka pembagian peran, tugas, dan keterbukaan, untuk mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai bila dikerjakan tanpa kemitraan (Widdus, 2003).

Kemitraan dalam bidang komunikasi Komnas FBPI ini sejak awal memang tidak ada kesepakatan pembagian peran. Hal ini dikarenakan *working group communication* ini tidak melakukan suatu kegiatan atau proyek tertentu melainkan merupakan suatu bentuk koordinasi dan pen-sinergian kegiatan-kegiatan mitra agar tidak saling tumpang tindih. Adapun berdasarkan wawancara dengan institusi terkait, mereka dengan lugas dapat menjawab peran mereka masing-masing. Kejelasan peran tersebut karena mereka menyesuaikan diri dengan keahlian mereka. Seperti Depkominfo yang memiliki peran dalam komunikasi dan diseminasi, Unicef yang memiliki keunggulan di komunikasi dalam artian membuat strategi komunikasi, Muhammadiyah yang memang fokus pada pemberdayaan masyarakat, CBAIC yang fokus lebih pada *community base*, dan lain sebagainya.

Kejelasan peran setiap institusi termasuk menjelaskan siapa berbuat apa, akan menjadi motivasi tersendiri bagi setiap institusi untuk bekerja secara optimal

(Dirjen P2M & PL, 2000). Dengan kejelasan peran yang sekarang telah di pahami tiap mitra, walaupun tidak ada dokumen tertulis, diharapkan tiap mitra dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan lebih optimal dan tidak ada yang tumpang tindih.

7.2.1.4 Pengalaman

Libby (1995) mengatakan bahwa kinerja seseorang dapat diukur dengan beberapa unsur antara lain kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*) dan pengalaman (*experience*). Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih (Christ,1993).

Dengan adanya pengalaman bermitra maka kemitraan yang terjalin dalam kelompok kerja komunikasi ini dapat lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jeffrey (dalam Sri Sularso dan Ainun Na'im, 1999), memperlihatkan bahwa seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai peristiwa-peristiwa.

Hasil wawancara mendalam dengan informan, seluruh instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki pengalaman dalam melakukan hubungan kerjasama. Namun, tidak semua kerjasama tersebut berbasis kemitraan. Hal ini dikarenakan ada yang instansinya merupakan sub-kontraktor dari instansi lain, yang di dalam kerjasama tersebut tidak ada memenuhi prinsip kesetaraan ataupun keterbukaan. Hanya memenuhi prinsip saling menguntungkan. Namun demikian, informan mengatakan banyak sekali kemitraan yang telah mereka jalankan sehingga tidak dapat dihitung lagi. Pola subkontraktor adalah suatu

sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, dimana usaha besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada usaha kecil atau menengah selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung penuh pada perusahaan induk (Soewito, 1992).

Cara pengembangan pengalaman sebagai manifestasi peningkatan keahlian, pengetahuan dan kemampuan (*skill, knowledge and ability*) dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, diskusi/seminar, studi banding atau dengan praktek lapangan yang lebih intensif (<http://www.damandiri.or.id/file>). Melalui pengembangan pengalaman dalam kemitraan maka bentuk kemitraan yang sudah ada ini dapat berjalan lebih baik lagi.

7.2.2 Tingkat/Jenjang Kemitraan

Menurut Heideneim (2002), ada lima tingkat atau jenjang dalam suatu kemitraan yaitu *full collaboration, coalition, partnership, alliance*, dan *network*. Pada *full collaboration* merupakan tingkat tertinggi dimana terdapat kesepakatan tertulis, adanya pembagian visi, dan adanya pembagian tugas yang tertulis. Jenjang di bawahnya yaitu *coalition* yaitu terdapat kesepakatan formal, semua anggota turut terlibat di dalamnya, adanya sumber daya baru, dan ada anggaran bersama. Pada tingkat *partnership*, terdapat kontrak formal, ada sumber daya baru, adanya pembagian risiko dan penghargaan. *Alliance* merupakan bentuk semi formal, ada beberapa sumber daya baru, adanya koordinasi tugas, dan terakhir

network yang memiliki ciri hubungan yang tidak terikat dan tidak ada manfaat/keuntungan yang didapat secara signifikan.

Berdasarkan wawancara, baik secara tersirat maupun tersurat, informan-informan menyebutkan bahwa kemitraan yang mereka jalin tidak memiliki kontrak yang formal, tidak ada dokumen-dokumen tertulis mengenai kesepakatan-kesepakatan, ada koordinasi dalam tugas atau kegiatan untuk menghindari tumpang tindih, dan hubungan antar mitra bersifat semi formal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dijalin dalam *working group communication* ini berada di tingkat *alliance*.

7.2.3 Faktor Pengelolaan Kemitraan

7.2.3.1 Dasar Hukum/Peraturan

Utrecht (1983) memberikan batasan hukum bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Dari pengertian tersebut tersirat tugas hukum yaitu menjamin kepastian hukum hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan. Di dalam tugas itu otomatis tersimpul dua tugas lain, yang kadang-kadang tidak dapat disetarakan yaitu hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat

memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan.

Dalam kemitraan kelompok kerja komunikasi ini tidak ada peraturan atau prosedur khusus yang tertuang baik dalam dokumen ataupun kesepakatan-kesepakatan. Kemitraan ini tidak memiliki SKB (Surat Keputusan Bersama) yang khusus. Dalam kemitraan antara sektor pemerintah dilandaskan dalam SK Menkokesra, sehingga dianggap sudah cukup atau tidak perlu dibuat SK khusus dalam kemitraan di bidang komunikasi Komnas FBPI ini.

Kerjasama kemitraan dengan institusi non-pemerintahan dilakukan secara informal, untuk institusi berbadan hukum biasa dilakukan kesepakatan formal, dalam bentuk kesepakatan biasa (*memorandum of understanding/MoU*) atau kontrak yang mengatur pembagian tugas dan penggunaan dana untuk institusi bukan badan hukum. Biasanya akan lebih lancar kalau menggunakan pendekatan informal. Untuk kondisi ini, kesepakatan lisan juga dapat dilakukan (Ditjen PPM & PL).

Menurut Levinger (2004), kebanyakan kemitraan yang berhasil tidak memiliki struktur hirarki yang formal juga tidak berada di bawah kontrak yang legal kecuali dalam instansi dimana ada dana yang harus di *manage*. Yang perlu diperhatikan adalah Komnas FBPI sebagai koordinator dalam kelompok kerja komunikasi ini menempatkan institusi mitra-mitra ini dengan bijaksana, tidak menempatkan diri lebih tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi komitmen kemitraan itu sendiri.

7.2.3.2 Mekanisme dan Kualitas Komunikasi

Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk menimbulkan saling pengertian, bukan persetujuan. Komunikasi merupakan pertukaran pemikiran, fakta, gagasan, opini, antara dua orang atau lebih sehingga menimbulkan pengertian, kepercayaan, dan pada akhirnya terwujudnya hubungan yang baik (Azwar, 1996).

Komunikasi yang dilakukan dalam kemitraan kelompok kerja komunikasi dengan cara formal dan informal. Formal melalui forum atau rapat koordinasi. Selama ini forum diadakan karena adanya kebutuhan atau keperluan dalam koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi kegiatan serta sharing pengalaman. Forum ini sudah terlaksana sebanyak 6 kali, yaitu tanggal 8 November 2006; 10 Mei, 1 Agustus, dan 5 November 2007; serta 28 Februari dan 13 Juni 2008. Forum ini belum terjadwal dengan teratur, dalam artian masih berdasarkan inisiatif-inisiatif koordinator atau lebih dikarenakan ada isu atau agenda yang harus dibahas. Sebagai koordinator dalam forum ini adalah bidang komunikasi Komnas FBPI. Bidang komunikasi Komnas FBPI ini mengundang tiap mitra yang sebelumnya telah dihubungi mengenai waktu kosong tiap instansi.

Tingkat kehadiran instansi dalam forum kemitraan ini cukup baik. Dilihat dari 5 pertemuan (dihitung dari pertemuan kedua samapi keenam), instansi yang selalu hadir adalah Unicef dan CBAIC (100%), sedangkan mitra lainnya Deptan, Depkes, Depkominfo, WHO, dan FAO tingkat kehadirannya juga tinggi, hanya satu kali pertemuan saja yang tidak mereka hadiri (80%), sedangkan yang paling rendah adalah Muhammadiyah karena Muhammadiyah memang baru mengikuti forum pada pertemuan keempat. Ketidakhadiran peserta forum bukan dikarenakan

faktor kesengajaan. Biasanya mereka yang tidak hadir disebabkan adanya jadwal lain di instansi atau organisasinya dan tidak ada yang dapat mewakilinya.

Bila dilihat dari persentase kehadiran per pertemuan, rata-rata tiap pertemuan dihadiri oleh 85,5% peserta. Bahkan ada dua kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh peserta (100%). Pertemuan koordinasi lintas sektor pada tingkatan proses memerlukan dialog antar *stakeholder* yang bekerja sama selama satu atau dua tahun meliputi pertemuan-pertemuan pada berbagai tingkatan.

Kehadiran dalam sebuah forum dinilai sangat berpengaruh dalam membina hubungan dengan pelaku mitra yang lain. Hal ini karena dengan pertemuan dapat lebih mempererat hubungan interpersonal. Selain itu melalui pertemuan juga, konflik yang timbul dapat diatasi (Purnama, 2000).

Komunikasi yang bersifat non-formal melalui berbagai cara komunikasi seperti email, surat, telepon, dan lain sebagainya. Biasanya komunikasi dengan cara ini untuk tindak lanjut (*follow up*) dari kesepakatan bersama yang dihasilkan dari forum kelompok kerja komunikasi. Selain itu, juga pada saat Komnas ingin mengumpulkan tiap mitra agar bisa berkumpul untuk rapat koordinasi.

7.2.3.3 Saling Melengkapi Sumber Daya

John L. Mariotti (1999) menjelaskan bahwa kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, mitra yang besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga

kerja yang dimiliki oleh mitra yang kecil. Sebaliknya mitra yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi dapat terbantu melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh mitra besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Masing-masing pihak yang bermitra juga harus memahami bahwa mereka memiliki perbedaan, menyadari keterbatasan masing-masing, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan Ilmu Pengetahuan maupun penguasaan sumber daya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), dengan demikian mereka harus mampu untuk saling isi mengisi serta melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada.

Berdasarkan wawancara, setiap instansi mengaku terbuka dalam kemitraan yang dijalin. Masih menurut informan, mereka memberikan setiap data yang mereka miliki dan setiap kali Komnas FBPI, sebagai koordinator, menanyakan sesuatu pasti dijawab oleh mereka. Begitu juga penilaian antara satu mitra dengan mitra lainnya. Ketika ditanyakan keterbukaan mitra lain mereka menjawab bahwa semua mitra terbuka, misalnya Depkes selalu memberikan data mengenai kasus flu burung yang terjadi, begitu pula Deptan yang memberikan kasus pada unggas yang terjangkiti virus flu burung. Adapun mitra lain seperti Unicef, WHO, dan FAO selalu memberikan update situasi terkini. Selain itu, setiap mitra juga saling berbagi pengalaman di lapangan.

Selain saling membagi pengalaman, setiap instansi juga mengaku saling melengkapi sumber daya, seperti sumber daya manusia (tenaga), data dan informasi, serta fasilitas seperti tempat, namun tidak dalam daya dana. Menurut

seluruh informan, dana yang digunakan berasal dari tiap sektor (masing-masing), dan tidak ada anggaran bersama dalam kelompok kerja komunikasi ini. Hal ini dikarenakan kelompok kerja komunikasi ini hanya bentuk koordinasi dari bidang komunikasi Komnas FBPI dalam mensinergikan agenda-agenda kegiatan komunikasi flu burung agar tidak *overlap*, dan bukan suatu proyek. Selain itu juga kelompok kerja komunikasi ini digunakan sebagai tempat penyamaan visi yaitu penyamaan branding komunikasi. Padahal, salah satu indikator keberhasilan kemitraan adalah adanya sumber dana/biaya yang diperuntukkan khusus bagi pengembangan kemitraan dan memang telah disepakati bersama. Dengan dana tersebut maka kemitraan diharapkan dapat berkembang baik dari segi peningkatan internal maupun eksternal kemitraan misalnya penguatan hubungan antar mitra dan perluasan jumlah mitra.

7.2.3.4 Wadah Koordinasi

Program yang banyak melibatkan institusi baik lintas program, lintas sektor, termasuk organisasi profesi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat tidak akan dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak ada koordinasi yang jelas termasuk wadah dan mekanisme kerja yang mengatur keterkaitan berbagai institusi tersebut.

Wadah koordinasi dalam kemitraan di kelompok kerja komunikasi ini yaitu berupa forum atau pertemuan rapat koordinasi. Selama ini, dari tahun 2007-2008, forum yang sudah berjalan sebanyak 6 kali pertemuan. Tempat dilaksanakannya pertemuan ini sebagian besar yaitu 5 dari 6 pertemuan di sekretariat Komnas FBPI, sedangkan satu pertemuan lainnya di kantor Unicef

Indonesia. Hal ini karena Unicef saat itu sebagai fasilitator dan yang mencetuskan agenda. Dengan adanya wadah koordinasi tersebut maka kegiatan komunikasi dapat terlaksana dengan baik, tidak ada overlap dan secara tidak langsung dapat digunakan sebagai tempat evaluasi kegiatan komunikasi. Misalnya, sharing pengalaman yang telah dilakukan selama ini dapat menjadi pembelajaran bagi mitra yang lain bila melakukan kegiatan yang hampir sama.

Dalam forum kelompok kerja komunikasi yang berperan sebagai koordinator adalah Komnas FBPI bidang komunikasi. Bidang komunikasi Komnas FBPI ini mengatur atau mengkoordinir setiap kegiatan mitra dari segi perencanaan hingga pelaksanaan sehingga tidak ada kegiatan ataupun program yang tumpang tindih (*overlap*) baik dari segi tempat maupun waktu pelaksanaan program atau kegiatan.

7.2.3.5 Peredaan Masalah dan Konflik

Permasalahan yang dihadapi dalam kemitraan kelompok kerja komunikasi ini lebih kepada masalah koordinasi. Sebagian besar mitra memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut tidak hanya mengenai masalah flu burung saja. Akibatnya menyatukan waktu untuk sharing bersama agak sulit untuk dilakukan mengingat waktu mereka yang padat. Hal ini dikarenakan ada beberapa mitra yang belum memprioritaskan kelompok kerja komunikasi ini dalam agendanya.

Masalah lainnya yang pernah ada yaitu perbedaan pendapat yang terjadi di tahun 2007 dimana ada perbedaan slogan atau *brand* kampanye nasional. Perbedaan tersebut disebabkan ke-egoan instansi. Namun, pada akhirnya masalah

tersebut dapat dipecahkan setelah mereka duduk bersama dan menyadari bahwa dengan adanya satu *brand* maka masyarakat tidak akan bingung dengan pesan yang mereka kirimkan. Dengan satu brand pula dunia akan melihat bahwa Indonesia melakukan koordinasi yang baik dalam komunikasi.

Menurut pandangan modern, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi. Sama halnya yang terjadi dalam hubungan kemitraan dalam kelompok kerja komunikasi ini karena walaupun hanya konflik kecil yang muncul akan tetapi diabaikan oleh manajemen maka akan timbul potensi munculnya konflik yang lebih besar dan melibatkan kelompok-kelompok dalam organisasi (Purnama: 2000). Bagi organisasi, yang penting adalah bagaimana mengelola konflik agar efektif bagi organisasi sehingga konflik tersebut berdampak positif. Menurut Kreps dalam Nursya'bani Purnama (2000), dampak positif dan konstruktif dari konflik yang dikelola dengan baik yaitu :

- 1) sebagai tanda peringatan dini terhadap masalah yang muncul,
- 2) sebagai katub pengaman,
- 3) meningkatkan interaksi dan keterlibatan kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang timbul,
- 4) menumbuhkan kreativitas,
- 5) menjembatani penyelesaian masalah,
- 6) mendorong penyampaian informasi antar kelompok, dan
- 7) menguji ide-ide yang muncul dari anggota organisasi, dan solusi yang ditawarkan atas masalah yang terjadi.

7.2.3.6 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pelaku kemitraan karena tidak ada monev yang dilakukan bersama. Sejak awal pembentukan kemitraan ini belum ada kesepakatan mencakup cara memantau dan menilai. Namun demikian, melalui forum para mitra selalu berbagi pengalaman sehingga secara langsung dilakukan evaluasi.

Evaluasi adalah cara yang sistematis untuk belajar dari pengalaman dan menggunakan pelajaran-pelajaran yang diperoleh untuk memperbaiki kegiatan yang sedang dilanjutkan dan untuk meningkatkan perencanaan yang lebih baik. Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sekarang serta untuk meningkatkan perencanaan yang lebih baik dengan menyeleksi secara seksama alternatif tindakan dimasa yang akan datang (WHO, 1990).

Dalam kemitraan penanganan flu burung di bidang komunikasi ini tidak ada bentuk monitoring dan evaluasi bersama, baik dari komnas FBPI kepada mitra-mitranya ataupun sebaliknya. Ada monitoring dan evaluasi tetapi itu dilakukan sendiri-sendiri atau secara sektor. Alasan tidak ada monitoring dan evaluasi karena memang tidak ada kegiatan bersama, mereka hanya melakukan pertemuan koordinasi. Monitoring dan evaluasi ini yang melakukan nantinya adalah instansi yang mengerjakan kegiatan komunikasi seperti kampanye atau seminar-seminar. Namun demikian, dengan adanya forum-forum yang isinya berupa diskusi seperti saling berbagi pengalaman juga merupakan bentuk evaluasi secara tidak langsung.

7.2.3.7 Manfaat untuk tiap Mitra

Hubungan akan bertahan lama jika kedua pihak saling merasa diuntungkan, tetapi akan putus jika salah satu pihak merasa (persepsi subyektif, tidak selalu nyata) dirugikan (Sarwono, 2003). Keuntungan ini dapat bersifat fisik ataupun non-fisik. Dari segi fisik misalnya kegiatan instansi dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghemat pengeluarann (*cost effective*), sedangkan dari segi non-fisik misalnya adanya pembagian informasi dan pengalaman yang berguna nantinya bagi instansi tersebut.

Seluruh informan yang mewakili instansinya menuturkan bahwa kemitraan yang telah dijalin dalam kelompok kerja komunikasi ini membuahkan hasil atau keuntungan bagi instansinya. Baik secara fisik maupun non-fisik. Misalnya saja ada mitra yang merasa terbantu dengan adanya sharing pengalaman karena mereka bisa belajar dari kesalahan mitra yang lain sehingga instansinya bisa meminimalisir kesalahan nantinya. Ataupun ada yang mengatakan dengan adanya kemitraan ini instansinya dapat menghemat pengeluaran atau lebih *cost effective*, karena menghindari *overlap* (tumpang tindih kegiatan), selain itu mereka juga jadi tahu arah komunikasi flu burung. Adapula yang menyebutkan manfaat dari kemitraan dalam bidang kemitraan ini yaitu masyarakat jadi lebih memahami masalah flu burung, melakukan, perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku dalam penanganan dan pencegahan flu burung, yang apabila dilakukan sendiri-sendiri tidak akan tercapai atau tercapai tapi dalam waktu yang lama.

Pada prinsipnya setiap mitra mendapatkan keuntungan dari jalinan kemitraan ini. Dengan adanya keuntungan maka diharapkan hubungan yang telah

terjalin ini (kemitraan) akan lebih bertahan lama dan dapat menjadi contoh bagi bentuk kerjasama lainnya.

7.2.4 Pengembangan dan Keberhasilan Kemitraan

Pengembangan kemitraan baik secara sektoral/fungsional maupun wilayah, selama ini relatif masih belum optimal, masih merupakan prospek, aktualisasinya masih sangat terbatas. Kemitraan yang merupakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dari dua belah pihak yang bermitra yang dibangun berdasarkan kesamaan tujuan, dengan demikian, kemitraan akan berjalan efisien dan efektif dan dapat berjalan secara berkelanjutan atau tidaknya sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung, antara lain:

- 1) Keterkaitan kegiatan. Adanya keterkaitan akan menimbulkan ketergantungan antar mitra satu dengan yang lain
- 2) Kesetaraan posisi
- 3) Kondisi lingkungan seperti kebijakan pemerintah;
- 4) Kebijakan pembinaan;
- 5) Ada tidaknya potensi konflik

Kemitraan hanya akan bersifat sementara, tidak berkelanjutan atau akan berhenti di tengah jalan jika tidak memenuhi faktor-faktor penentu seperti tersebut di

atas

(http://www.smeccda.com/kajian/files/hslkajian/Pengk_Peng_Kemitra2002.pdf).

Berdasarkan hal tersebut, kemitraan di bidang Komunikasi Komnas FBPI ini sebenarnya memiliki peluang untuk berkembang lebih besar karena ada keterkaitan dalam kegiatan, adanya prinsip kesetaraan, ada kebijakan pemerintah

yaitu perpres no.7 tahun 2006, adapula renstranas AI dan PI. Namun, belum ada kebijakan pembinaan. Tak dapat dipungkiri dalam kemitraan ini terdapat potensi konflik, namun bila dapat dikelola dengan baik maka dapat berdampak positif.

Berkembangnya suatu kemitraan juga dapat dilihat dari penambahan jumlah mitra dan kegiatan yang dihasilkan. Sejak terbentuknya kemitraan di Komnas FBPI bidang komunikasi ada penambahan mitra walaupun tidak signifikan dan sudah banyak kegiatan yang dihasilkan.

Belum ada kesepakatan tindak lanjut dari kemitraan kelompok kerja komunikasi ini, yang merupakan salah satu bentuk kesinambungan dan perkembangan kemitraan kedepannya. Hal ini lebih disebabkan ketidakjelasan kurun waktu atau masa tugas dari beberapa instansi seperti Komnas FBPI yang akan berakhir pada tahun 2010 kecuali bila diperpanjang (Perpres Mo. 7 tahun 2006), dan CBAIC yang habis masa kontraknya tahun 2008 ini. Namun, beberapa instansi berharap dengan kemitraan ini akan ada tindak lanjut baik berupa koordinasi kegiatan, pemetaan agenda kegiatan selam kurun waktu tertentu, adanya kerjasama yang berlanjut, dan lain sebagainya.

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Indikator keberhasilan suatu kemitraan dapat dilihat dari unsur input, proses, dan output. Dari input dilihat dari jumlah mitra yang menjadi anggota, dari proses yaitu kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, jumlah kegiatan, dan keberlangsungan. Sedangkan dari output dilihat dari jumlah produk, percepatan upaya, efektifitas, dan efisiensi.

Berdasarkan wawancara, 5 dari 6 informan mengatakan bahwa kemitraan yang sekarang sudah berjalan dianggap berhasil. Namun, ada juga yang

menyebutkan berhasil tapi belum sempurna. Satu informan tidak mengatakan apakah kemitraan tersebut berhasil atau tidak karena menganggap bahwa bukan dirinya atau instansinya yang menilai tapi harus dari luar instansinya.

Bila dinilai dari indikator keberhasilan kemitraan di atas, kemitraan dalam *working group communication* ini sudah cukup berhasil. Bila ditinjau dari input yaitu jumlah mitra yang menjadi anggota, berdasarkan wawancara, ada peningkatan jumlah peserta terhitung dari sejak terbentuknya kemitraan ini yaitu dari PP Muhammadiyah dan GTZ. Dari proses dilihat melalui kontribusi mitra yang memang cukup inisiatif terlihat dari forum yang hampir setiap mitra menghadirinya dan keaktifan mereka dalam memberikan tanggapan dalam forum, frekuensi pertemuan pun sudah rutin yaitu satu atau dua bulan sekali walaupun tidak terjadwal, jumlah kegiatan yang dihasilkan tiap mitra pun sudah tidak terhitung lagi karena banyak sekali. Dari segi output pun sudah tercapai yaitu dari sisi efektifitas dan efisiensi karena dalam kemitraan ini setiap mitra dapat lebih menghemat sumber daya dan ada sharing pengalaman sehingga bisa belajar dari kesalahan mitra lain.

7.2.5 Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di bidang Komunikasi

Komnas FBPI

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi, disebutkan bahwa ada 17 kementerian yang harus terlibat dalam penanganan flu burung ini, dan berasal dari lintas sektor. Akan tetapi dalam bidang komunikasi komnas FBPI baru 3 instansi lintas sektor yang terlibat yaitu departemen kesehatan, departemen

pertanian, dan departemen komunikasi dan informasi. Walaupun dalam Renstranas Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi influenza tahun 2006-2008 ketiga departemen tersebut merupakan penanggungjawab dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Strategi), namun seharusnya setiap instansi lintas sektor yang lain juga ikut berperan serta.

Seharusnya semua sektor, baik terkait langsung dengan kesehatan ataupun tidak, dapat turut serta mensosialisaikan penyakit flu burung ini. Hal ini dikarenakan flu burung merupakan masalah bersama yang bila tidak ditangani maka akan terjadi pandemi yang dampaknya tidak hanya merugikan sektor tertentu saja tetapi juga semua pihak. Prinsip yang harus dibangun dalam kemitraan salah satunya adalah bahwa kesehatan merupakan aspek yang paling utama dalam kehidupan manusia. Sektor kesehatan harus mampu meyakinkan kepada sektor lain bahwa *“health is not everything, but without health everything is nothing”*. Dalam rangka mengembangkan jumlah mitra terutama dari lintas sektor ini diperlukan informasi dan advokasi sehingga tiap sektor mau berperan serta dalam kemitraan ini.

Pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan rakyat (Purwoko, 2006). Adapun mitra dari non-pemerintah yang aktif ikut serta dalam kelompok kerja komunikasi adalah WHO, FAO, Unicef, CBAIC, GTZ, dan PP Muhammadiyah. Melalui kemitraan dengan instansi non-pemerintah ini diharapkan dapat lebih meluaskan cakupan

atau target dari komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penanganan flu burung di Indonesia.

